

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA TENGAH

Rizqi Dwi Setianingrum, Haryanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Prof. Soedharto, SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The study aims to analysis of financial performance of regency and city governments in Central Java Province, is providing an important information in find out how the level of success implementing regional autonomy and transparent local financial management to run the welfare of society. One of the lays to analyze the government's financial is to run an analysis the financial ratio. The purpose of this study is to find out the financial performance capabilities of local government of regency and city in Central Java Province from 2016 until 2018. The research method used is quantitive descriptive to measure the financial performance with ratio, the data used is in the form of Budget Realization Report and Balance. The results of the research reveals that: Sukoharjo Regency and Semarang City is highest of decentralized ratio, and Blora Regency and Pekalongan City is lowest of decentralized ratio. Cilacap Regency and Semarang City is highest of independence ratio and Blora Regency and Pekalongan City is lowest of independence ratio. The effectiveness ratio, Sukoharjo Regency and Salatiga City is highest and Magelang Regency and Pekalongan City is lowest. The harmony ratio: operating expense ratio, Batang Regency and Tegal City is highest and Demak Regency and Semarang City is lowest, capital expenditure ratio, Demak Regency and Semarang City is highest and Batang Regency and Tegal City is lowest. The growth ratio, Klaten Regency and Magelang City is highest and Temanggung Regency and Tegal City is lowest. The liquidity ratio: current ratio, Wonosobo Regency and Magelang City is highest and Temanggung Regency and Surakarta City is lowest.

Keywords: *financial performance, decentralized ratio, independence ratio, effectiveness ratio, growth ratio, current ratio*

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai beribu pulau tersebar dan terbagi menjadi 34 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten. Berdasarkan persebaran geografis yang dimiliki, Indonesia sangat tidak efektif jika dalam menjalankan sistem pemerintahan hanya secara terpusat. Melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah, ditetapkannya sistem otonomi daerah sehingga seringkali disebut sebagai UU Otonomi Daerah. Berdasarkan UU di atas, dapat ditarik garis

¹ *Corresponding author*

besar bahwa otonomi daerah adalah keleluasaan yang diberikan kepada daerah dengan menganut prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan rakyat dengan direalisasikan secara nyata dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya daerah yang ada guna pemangunan daerah sebagai bentuk bertanggung jawab kepada daerah.

Desentralisasi merupakan salah satu bentuk dilaksanakannya otonomi daerah dengan harapan kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri pembangunan daerahnya guna kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah melaksanakan tugas tersebut berpedoman pada undang-undang yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat sebagai perubahan dari UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999.

Mengukur dan melihat kinerja pemerintah dalam diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sangat penting karena keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah diukur dari kinerjanya. Kemampuan mengelola anggaran mencerminkan bagaimana pemerintah daerah untuk mengali potensi daerah guna meningkatkan pendapatan yang mempengaruhi pula tingkat pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun daerahnya.(Tambuwun,2014).

Analisis rasio keuangan pada APBD bisa dipakai sebagai tolak ukur dinilainya kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah,efektivitas realisasi pendapatan daerah dan mengukur tingkat efisiensi belanja, jadi salah satu alat ukur yang dapat dipakai untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan daerah yang dihasilkan dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam mengelola keuangan.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya hanya melakukan penelitian pada satu daerah dalam menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan daerah secara luas yaitu kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan rasio keuangan dengan perhitungan yang diharapkan dapat

memberikan hasil dan informasi yang maksimal mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2016-2018.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan kepada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Neraca.

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1. Teori *Stewardship*

Menurut Donaldson dan Davis (1991) *stewardship theory* sebagai teori tertinggi yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yang menggambarkan dimana target hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi merupakan fokus utama daripada tujuan-tujuan individu para manajemen sendiri.

2. Kinerja Keuangan

Menurut Mahmudi (2016:25) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil perolehan dari kegiatan yang sudah atau belum dilaksanakan berkaitan dalam penggunaan anggaran daerah dengan menilai efisensi pada pelayanan kepada masyarakat sebagai alat ukur kemampuan daerah. Sehubungan dengan tujuan organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja keuangan harus ada dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Indra Bastian (2001:337) :

a. Indikator Masukan (Inputs)

Indikator Masukan adalah dana, sumber daya manusia, maupun informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan.

b. Indikator Keluaran (Output)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diperoleh dari suatu kegiatan yang telah dilakukan baik berupa barang maupun jasa. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

c. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator Hasil adalah hasil suatu kegiatan yang dapat diterima/dirasakan secara langsung oleh pihak lain/masyarakat dalam jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk/jasa yang dihasilkan dan produktivitas pegawai.

d. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator Manfaat adalah manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat/pihak lain atas hasil kerja pemerintah atau organisasi tertentu.

e. Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan yang telah dilakukan baik positif atau negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengukuran pendapatan masyarakat.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mardiasmo (2012:103) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat pengendalian utama bagi pemerintah sebagai alat untuk mengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan dan menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, standar evaluasi kinerja, otorisasi pengeluaran untuk masa depan dan alat pengaturan bermacam unit kerja pada seluruh aktivitas kerja. Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan mengimplementasikan kebijakan anggaran, meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintah daerah, membantu pemerintah daerah dalam memenuhi prioritas, dan meningkatkan transparansi serta pertanggungjawaban pemerintah daerah.

4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran dipresentasikan meliputi berbagai komponen pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian wajar. Laporan Realisasi Anggaran membandingkan antara realisasi dan anggaran (APBN/APBD).

5. Neraca

Suatu entitas yang pelaporan posisi keuangannya terdapat unsur dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu merupakan gambaran dari neraca. menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset merupakan sumber kekayaan yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah yang diperoleh dari masa lampau atau masa sekarang dengan harapan dapat bermanfaat di masa datang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya menimbulkan keluarnya aset pemerintah daerah di masa

mendatang. ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yakni selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas dalam neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

6. Analisis Rasio Keuangan

Menurut Halim (2012) pemakaian rasio keuangan untuk dianalisis pada APBD yang telah direalisasikan dan direncanakan sebelumnya oleh pemerintah daerah merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Membandingkan rasio kinerja keuangan suatu daerah dengan rasio kinerja keuangan pemerintah daerah lain yang memiliki potensi daerah relatif sama ataupun lokasi daerah terdekat juga dapat melihat bagaimana keadaan kinerja keuangan pemerintah tersebut terhadap pemerintah lainnya. Dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah salah satu caranya dengan menggunakan rasio kinerja keuangan. Beberapa rasio yang dapat digunakan yaitu: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, dan Rasio Likuiditas.

a. Rasio Desentralisasi Fiskal

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Kemandirian

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

c. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

d. Rasio Keserasian

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

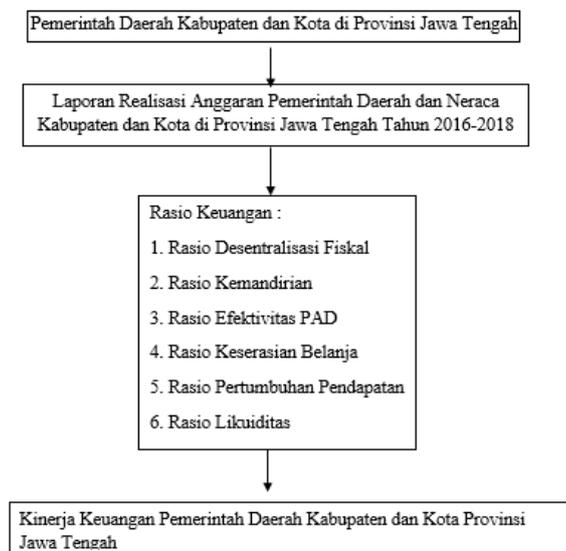
e. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{PAD}_{\text{tahun } t} - \text{PAD}_{\text{tahun } t-1}}{\text{PAD}_{\text{tahun } t-1}}$$

f. Rasio Likuiditas

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar (current assets)}}{\text{Utang lancar (current liabilities)}}$$

Kinerja pemerintah daerah dinilai berhasil dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan apa yang telah direncanakan. Kinerja keuangan pemerintah daerah digambarkan dengan pengelolaan keuangan dalam melaksanakan dan membangun daerah. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan analisis kinerja keuangan yang dapat diukur dengan beberapa rasio yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan, rasio likuiditas.



METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan yang diukur dengan menganalisis rasio keuangan. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, dan Rasio Likuiditas. Dalam menilai kinerja keuangan daerah menggunakan rasio keuangan

yang kemudian hasil dari penelitian tersebut dapat terlihat kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan skala interval masing-masing rasio keuangan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan total sampel yang digunakan 105 sampel. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tahun 2016-2018.

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik menganalisa data ilmiah dan sistematis terhadap bagian fenomena serta hubungan-hubungannya (Sugiyono, 2011). Peneliti deskriptif lebih banyak tidak dimaksudkan unruk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih menggambarkan apa adanya suatu gejala, variabel, atau keadaan.

Analisis rasio keuangan daerah dilakukan dengan membandingkan hasil kinerja keuangan daerah yang dicapai dari satu periode ke periode sebelumnya untuk melihat kecenderungan yang terjadi. Selain itu, analisis rasio keuangan daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan suatu daerah dengan daerah lain yang sekiranya relatif sama untuk mengetahui bagaimana keadaan pemerintah daerah tersebut.

Metode analisis *time series* yaitu data yang dipakai dalam analisis ini adalah data yang dikumpulkan dari rentetan waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu variabel tertentu. Data yang akan dianalisis dalam metode ini adalah kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2016-2018.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca selama tahun 2016-2018. Populasi yang digunakan

dalam penelitian ini 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Kriteria sebagai berikut dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 105 sampel.

Tabel 1
Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria
1.	Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah membuat Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2018
2.	Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah membuat Neraca tahun 2016-2018
3.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2018 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Deskripsi Variabel

Alat analisis deskriptif yang digunakan dalam analisis ini antara lain nilai minimum, nilai maksimal, mean, dan standar deviasi. Uji ini digunakan untuk memberikan gambaran rasio-rasio keuangan dari pemerintah kabupaten dan kota selama tahun 2016-2018.

Tabel 2
Statistika Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Desentralisasi 16	35	9,20	36,40	16,2286	5,56996
Desentralisasi 17	35	12,50	45,20	19,3229	6,14152
Desentralisasi 18	35	9,60	43,00	17,1486	6,37317
Kemandirian 16	35	11,30	72,00	21,0200	10,93020
Kemandirian 17	35	15,90	82,50	25,7057	11,95112
Kemandirian 18	35	12,60	79,10	23,1486	12,03342
Efektivitas 16	35	97,30	126,90	109,2000	6,41579
Efektivitas 17	35	97,20	128,50	106,1743	6,62110
Efektivitas 18	35	84,30	124,40	102,0943	7,77212
Belanja Operasi 16	35	54,60	87,60	76,9771	6,61985
Belanja operasi 17	35	70,50	86,90	77,5514	3,89595
belanja operasi 18	35	72,50	88,30	79,1943	4,14033
belanja modal 16	35	12,40	36,00	22,3600	5,27855
belanja modal 17	35	,00	29,50	21,7343	5,42982
belanja modal 18	35	11,70	27,40	20,7314	4,12459
pertumbuhan 2016	35	,00	,00	,0000	,00000
pertumbuhan 2017	35	-1,70	65,80	30,5029	19,65177
pertumbuhan 2018	35	-33,80	13,50	-10,0943	12,44085
lancar 2016	35	1,60	52,50	18,6171	13,85147
lancar 2017	35	1,40	120,10	19,7600	24,71483
lancar 2018	35	3,00	84,90	13,8771	15,03885
Valid N (listwise)	35				

Sumber: data diolah SPSS, 2019

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat diperoleh informasi mengenai derajat desentralisasi pada kabupaten dan kota selama tahun 2016 hingga tahun 2018. Analisis derajat desentralisasi tahun 2016 mencapai rata-rata 16,20% dapat dilihat pada tabel 2.2 hasil tersebut termasuk dalam pola kriteria derajat desentralisasi kurang. Analisis derajat desentralisasi dengan nilai terendah (minimum) yaitu 9,20% pada Kabupaten Blora yang termasuk dalam kategori sangat kurang dan nilai tertinggi (maksimum) yaitu 36,40%. Analisis derajat desentralisasi tahun 2017 mencapai rata-rata 19,32% yang dapat dikategorikan derajat desentralisasi kurang. Dengan nilai terendah (minimum) yaitu 12,50% pada Kabupaten Wonosobo yang termasuk dalam kategori kurang dan nilai tertinggi (maksimum) yaitu 45,20% pada Kota Semarang yang termasuk dalam kategori baik. Analisis derajat desentralisasi tahun 2018 mencapai rata-rata yaitu 17,14% yang dapat dikategorikan kurang. Analisis derajat desentralisasi tahun 2018 memiliki nilai terendah (minimum) yaitu 9,60% pada Kabupaten Blora yang termasuk dalam kategori sangat kurang dan nilai tertinggi (maksimum) yaitu 43,00% pada Kota Semarang yang termasuk dalam kategori baik.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat diperoleh informasi mengenai kemandirian kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Analisis kemandirian pada tahun 2016 dengan rata-rata sebesar 21,02% dapat dilihat pada tabel 2.3 pola kriteria kemandirian dikategorikan rendah sekali dengan pola instruktif. Analisis kemandirian tahun 2016 dengan nilai terendah (minimum) yaitu 11,30% pada Kabupaten Blora yang termasuk dalam kategori rendah sekali dengan pola instruktif dan nilai tertinggi (maksimum) yaitu 72,00% pada Kota Semarang yang termasuk dalam kategori sedang dengan pola partisipatif. Analisis kemandirian tahun 2017 dengan rata-rata sebesar 25,7% dapat di kategorikan rendah dengan pola konsultatif. Analisis kemandirian tahun 2017 memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 15,90% pada Kabupaten Banjarnegara yang dapat dikategorikan sangat rendah dengan pola instruktif dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 82,50% pada Kota Semarang yang termasuk kategori tinggi dengan pola delegatif. Analisis kemandirian tahun 2018 mencapai rata-rata sebesar 23,14% dapat dikategorikan sangat rendah dengan pola instruktif. Analisis kemandirian tahun 2018 memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 12,60% pada Kabupaten Blora yang termasuk kategori sangat rendah dengan pola instruktif dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 79,10% pada Semarang yang termasuk kategori tinggi dengan pola delegatif.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat diperoleh informasi mengenai analisis efektivitas PAD selama tahun 2016 hingga tahun 2018. Analisis efektivitas PAD tahun 2016 mencapai rata-rata sebesar 109,2% dapat dilihat pada tabel 2.4 kriteria efektivitas PAD yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Analisis efektivitas PAD tahun 2016 memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 97,30% pada Kabupaten Kudus yang termasuk kategori cukup efektif dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 126,90% pada Kabupaten Purworejo yang termasuk kategori sangat efektif. Standar deviasi sebesar 6,41% yang berarti data mengelompok atau tidak bervariasi. Analisis efektivitas PAD tahun 2017 mencapai rata-rata sebesar 106,17% yang termasuk kategori sangat efektif.

Analisis efektivitas tahun 2017 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 97,20% pada Kota Pekalongan yang termasuk kategori cukup efektif dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 128,50% pada Kabupaten Tegal yang termasuk kategori sangat efektif. Standar deviasi sebesar 6,62% yang berarti data mengelompok atau tidak bervariasi. Analisis efektivitas PAD tahun 2018 mencapai rata-rata sebesar 102,09% yang termasuk kategori sangat efektif. Analisis efektivitas PAD tahun 2018 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 84,30% pada Kabupaten Pekalongan yang termasuk kategori kurang efektif dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 124,40% pada Kabupaten Sukoharjo yang termasuk kategori sangat efektif. Standar deviasi sebesar 7,77% yang berarti data mengelompok atau tidak bervariasi.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat diperoleh informasi mengenai analisis keserasian belanja yaitu belanja operasi dan belanja modal selama tahun 2016 hingga tahun 2018. Analisis belanja operasi tahun 2016 mencapai rata-rata 76,97% dapat dilihat pada 2.1.14.4 rasio keserasian belanja termasuk dalam kategori serasi. Analisis belanja operasi tahun 2016 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 54,60% pada Kabupaten Semarang yang termasuk kategori serasi dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 87,60% pada Kabupaten Klaten yang termasuk kategori serasi. Analisis belanja operasi tahun 2017 mencapai rata-rata sebesar 77,55% yang termasuk kategori serasi. Analisis belanja operasi tahun 2017 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 70,50% pada Kota Semarang yang termasuk kategori serasi dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 86,90% pada Kabupaten Batang yang termasuk kategori serasi. Analisis belanja operasi tahun 2018 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 72,50% pada Kota Surakarta yang termasuk kategori serasi dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 88,30% pada Kabupaten Batang yang termasuk kategori serasi.

Analisis belanja modal pada tahun 2016 mencapai rata-rata sebesar 22,36% dapat dilihat pada 2.1.14.4 Rasio Keserasian belanja termasuk dalam kategori serasi. Analisis belanja modal pada tahun 2016 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 12,40% pada Kabupaten Klaten yang termasuk kategori serasi dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 36,00% pada Kabupaten Demak yang termasuk kategori serasi. Analisis belanja modal tahun 2017 mencapai rata-rata sebesar 21,73% yang termasuk kategori serasi. Analisis belanja modal tahun 2017 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 0% pada Kabupaten Tegal yang termasuk kategori tidak serasi dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 29,50% pada Kota Semarang yang termasuk kategori serasi. Analisis belanja modal tahun 2018 mencapai rata-rata sebesar 20,73% yang termasuk kategori serasi. Analisis belanja modal tahun 2018 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 11,70% pada Kabupaten Batang yang termasuk kategori serasi dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 27,40% pada Kota Surakarta yang termasuk kategori serasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan analisis, selanjutnya hasil dari analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota diinterpretasikan. Tabel berikut adalah rangkuman dari hasil analisis penelitian:

Tabel 3
Rangkuman Hasil Analisis Rasio Keuangan

No.	Rasio Keuangan	Hasil Penelitian
1	Rasio Desentralisasi Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten masih kurang (Tertinggi: Kab. Sukoharjo 20,83% dan terendah: Kab.Blora 9,22%) • Pemerintah Kota sedang (tertinggi: Kota Semarang 41,52% dan terendah: Kota Pekalongan 20,53%)
2	Rasio Kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten rendah sekali (tertinggi: Kab.Cilacap 27,18% dan terendah: Kab.Blora 14,12%) • Pemerintah Kota rendah (tertinggi: Kota Semarang 77,86% dan terendah: Kota Pekalongan 26,89%)
3	Rasio Efektivitas PAD	Pemerintah Kabupaten dan Kota sangat Efektif (tertinggi: Kab. Sukoharjo 119,51%; Kota Salatiga 111,48% dan terendah: Kab.Magelang 98,33%; Kota Pekalongan 95,74%)
4	Rasio Keserasian	Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai proporsi belanja operasi dan belanja modal <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Operasi (tertinggi: Kab.Batang 85,93%; Kota Tegal 81,40% dan terendah: Kab.Demak:70,65%; Kota Semarang72,36) • Belanja Modal (tertinggi: Kab.Demak 29,34%; Kota Semarang 27,62% dan terendah: Kab.Batang 14,06%; Kota Tegal 18,59%)
5	Rasio Pertumbuhan	Pemerintah kabupaten dan kota mengalami pertumbuhan fluktuatif (tertinggi: Kab.Klaten 24,10%; Kota Surakarta 7,84% dan terendah: Kab.Temanggung -2,88%; Kota Tegal -1,20%)
6	Rasio Likuiditas	Pemerintah kabupaten dan kota memiliki likuiditas sangat lancar (tertinggi: Kab.Wonosobo 59,01:1; Kota Magelang 80,44:1 dan terendah: Kab.Temanggung 2,01:1 ; Kota Surakarta 7,82:1)

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Kabupaten Sukoharjo dengan posisi desentralisasi Tertinggi yaitu 20,83% dan terendah Kab.Blora 9,22% Penelitian tentang tingkat desentralisasi keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah sejalan dengan hasil penelitian dari Ekasari (2018) yang melakukan penelitian di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2014-2016 dengan metode yang sama dan menghasilkan kesimpulan hasil tingkat desentralisasi Tulungagung masih kurang. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan tingkat desentralisasi dapat menggambarkan kinerja keuangan suatu daerah. Melalui

derajat desentralisasi dapat digambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, tingkat kemandirian tertinggi adalah Kab.Cilacap 27,18% dan terendah: Kab.Blora 14,12% dan pemerintah kota, posisi tertinggi Kota Semarang 77,86% dan terendah: Kota Pekalongan 26,89%. penelitian tentang tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah sejalan dengan hasil penelitian Pangkey (2017) yang melakukan penelitian di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2011-2015 dengan menggunakan metode yang sama dan menghasilkan kesimpulan tingkat kemandirian masih sangat rendah. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan tingkat kemandirian dapat menggambarkan kinerja keuangan suatu daerah. Tingkat kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai sendiri seluruh kegiatan atau program pemerintah yang dilaksanakan untuk pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer yang didalamnya meliputi bantuan dari pemerintah pusat atau pun provinsi.

Dari hasil penelitian ini rasio efektivitas PAD tertinggi adalah Kabupaten Sukoharjo 119,51%; Kota Salatiga 111,48% dan posisi terendah Kab.Magelang 98,33%; Kota Pekalongan 95,74%. Penelitian tentang tingkat efektivitas PAD keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah sejalan dengan hasil penelitian Tambuwun (2014) melakukan penelitian di Kota Manado pada tahun 2011-2013 dengan metode yang sama dan menghasilkan kesimpulan tingkat efektivitas cukup efektif. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan tingkat efektivitas dapat menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk rata-rata tingkat efektivitas pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018 termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada di atas 100%.

Hasil penelitian pada rasio keserasian adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai proporsi belanja operasi dan belanja modal. Pada Belanja Operasi posisi tertinggi: Kab.Batang 85,93%; Kota Tegal 81,40% dan terendah Kab.Demak:70,65%; Kota Semarang72,36%. Sedangkan pada Belanja Modal posisi tertinggi Kab.Demak 29,34%; Kota Semarang 27,62% dan posisi terendah Kab.Batang 14,06%; Kota Tegal 18,59%. Penelitian tentang tingkat keserasian keuangan daerah pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah sejalan dengan hasil penelitian Pangkey (2017) melakukan penelitian di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2011-2015 dengan menggunakan metode yang sama dan menghasilkan kesimpulan tingkat keserasian masih belum seimbang. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan tingkat keserasian menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana pada Belanja operasi (rutin) dan belanja modal (pembangunan) secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian ini, rasio pertumbuhan pemerintah kabupaten dan kota mengalami pertumbuhan fluktuatif dengan posisi tertinggi Kab.Klaten

24,10%; Kota Surakarta 7,84% dan posisi terendah: Kab.Temanggung -2,88%; Kota Tegal -1,20%. Penelitian tentang tingkat pertumbuhan pendapatan keuangan daerah pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah sejalan dengan hasil penelitian Saputra (2016) melakukan penelitian di Kabupaten Jembrana pada tahun 2010-2014 dengan menggunakan metode yang sama dan menghasilkan kesimpulan tingkat pertumbuhan yang positif. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan tingkat pertumbuhan menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena pertumbuhan pendapatan berguna untuk menggambarkan pemerintah daerah dalam tahun anggaran tertentu atau selama periode anggaran, dalam kinerja keuangan APBD mengalami pertumbuhan positif atau negatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, rasio likuiditas (lancar) pemerintah kabupaten dan kota memiliki likuiditas sangat lancar dengan posisi tertinggi Kab.Wonosobo 59,01:1; Kota Magelang 80,44:1 dan posisi terendah Kab.Temanggung 2,01:1 ; Kota Surakarta 7,82:1. penelitian Fathiyah (2017) melakukan penelitian di Provinsi Jambi pada tahun 2014-2015 dengan menggunakan metode yang sama dan menghasilkan kesimpulan tingkat likuiditas rasio lancar terkategori lancar. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan tingkat likuiditas dapat menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio lancar menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam membayar utang jangka pendek. Semakin tinggi rasio lancar maka semakin besar kemampuan instansi pemerintah untuk memenuhi utang jangka pendek.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan yaitu Rasio Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Likuiditas. Hasil analisis kinerja dapat dinilai dengan menginterpretasikan hasil perhitungan rasio keuangan berdasarkan indikator masing-masing rasio keuangan. Penelitian ini memiliki 105 sampel yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca pada Tahun 2016-2018.

Dapat disimpulkan, pemerintah daerah kota di Provinsi Jawa Tengah lebih siap melaksanakan otonomi daerah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. rasio kemandirian, kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten dapat dikategorikan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Hal ini menggambarkan pemerintah pusat masih memiliki campur tangan besar dalam melaksanakan otonomi daerah pada pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pada pemerintah kota, Hal ini menggambarkan pemerintah kota memiliki rata-rata rasio kemandirian dengan pola konsultatif bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah berkurang, dan pemerintah kota dianggap sudah sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. Pada rasio efektivitas PAD, kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sangat efektif. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah dapat merealisasikan target penerimaan PAD yang sudah direncanakan dengan sangat baik. Untuk rasio keserasian, kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah memiliki

keserasian dalam mengalokasikan belanja operasi dan belanja modal. Kinerja keuangan dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan, pemerintah kabupaten dan kota masih fluktuatif. Untuk rasio likuiditas, pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kemampuan menyelesaikan pembayaran hutang jangka pendek sangat baik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan dan memerlukan perbaikan pada penelitian berikutnya. Keterbatasan studi penelitian ini yaitu penelitian ini hanya menganalisa dengan metode analisis deskriptif dan rasio keuangan saja, sehingga perlunya mengembangkan metode yang dapat mengoptimalkan dalam menganalisis kinerja keuangan.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang diberikan yaitu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih dalam mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio keuangan yang lebih lengkap dan mengembangkan metode analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2019. *Neraca Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016*. Jawa Tengah.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2019. *Neraca Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017*. Jawa Tengah.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2019. *Neraca Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018*. Jawa Tengah.
- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- BPKAD Provinsi Jawa Tengah. 2019. *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2018*. Jawa Tengah.
- BPKAD Provinsi Jawa Tengah. 2019. *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016*. Jawa Tengah.
- BPKAD Provinsi Jawa Tengah. 2019. *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017*. Jawa Tengah.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2019. *Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah*. jateng.bps.go.id.
- Dewi, D. L. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *eJournal Undip*.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholder. *Australian Journal of Management*, 49-64.
- Dr. Haryanto, C. 2017. *Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah*. Semarang: BP UNDIP Press.
- Ekasari, L. 2018. Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016. *Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri*.

- Erawati, N. M. 2012. Analisis Kinerja Kawasan Metropolitan Sarbagita. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Fathiyah, & Masnun. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Basis Akrual Tahun 2014-2015. *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business*.
- Fitriani, N. L., & Dwirandra, A. 2014. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.1*, 211-227.
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Mahmudi. 2016. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah* . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- Pangkey, A. H., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal EMBA*, 2848-2858.
- Rahmawati, N. K. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1767-1795.
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiatmaja, F. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. *e-Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Sugiyono. 2011. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Tambuwun, E. L., Pangemanan, S. S., & Afandi, D. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 81-89.
- Tan, S. 2010. *Perencanaan Pembangunan-Teori Implementasi pada Pembangunan Daerah*. Jambi: Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.
www.jatengprov.go.id.